

Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Keterangan	SD	SMP
Alokasi (Rp)	10,825 triliun	5,441 triliun
Per siswa kabupaten (Rp)	400.000	570.000
Per siswa kota (Rp)	397.000	575.000

BOS 2012 masukkan indeks kemahalan barang

JAKARTA: Mendiknas Mohammad Nuh mengatakan anggaran BOS 2012 akan diubah dengan memasukkan indeks kemahalan barang di suatu daerah. Struktur anggarannya juga diubah sehingga unit biayanya akan mampu membiayai seluruh dana operasional sekolah yang kini mencapai 70%.

Menurut dia, tahun depan anggaran pendidikan akan naik Rp40 triliun. Pada 2005, anggaran pendidikan di APBN mencapai Rp78 triliun, adapun pada 2011 sebesar Rp148 triliun, sedangkan untuk 2012 sekitar Rp290 triliun.

"Untuk anggaran BOS tahun depan kami masukkan indeks kemahalan barang di suatu daerah," ujarnya, akhir pekan lalu.

Dana BOS setiap tahun meningkat. Pada 2011, dananya Rp16,266 triliun dengan rincian Rp10,825 triliun untuk jenjang SD dan Rp5,441 triliun untuk jenjang sekolah menengah.



Sumber: Kemendiknas, 2011

BISNIS/HSS/ILHAM NESABANA

KUOTA

Krisis guru perlu diantisipasi

JAKARTA: PGRI meminta Kemendiknas serius mengantisipasi ancaman krisis guru pada 2014, karena banyak tenaga pendidik yang akan memasuki usia pensiun.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyono mengatakan pemerintah harus memetakan penyediaan guru dan penyebarannya.

"Kami memprediksikan pensiun massal akan dimulai 2014, dan puncaknya pada 2018," ungkap Sulistyono, baru-baru ini.

Pensiun massal dan krisis guru ini muncul sebagai dampak dari pengangkatan serentak tenaga guru SD pada 1974. Persoalan lain adalah penyebarannya yang timpang, di mana guru menumpuk di kota-kota besar, adapun di daerah perbatasan justru kekurangan. (BISNIS/HSS)

Pemberi izin ilegal dipecat

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pejabat yang terindikasi menerbitkan surat izin pendirian dan operasional minimarket ilegal dipisahkan dipecat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan sanksi pemecatan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Ada aturannya di PP 53/2010, sanksi terberat bagi PNS ya dipecat. Tapi sebelum kita mengeluarkan sanksi tersebut kita akan pelajari dulu kasusnya. Kalau memang berat, terancam terkena sanksi berat," ujarnya. (BISNIS/TDW)

Impor alas kaki China ke RI melonjak

Pasar lokal dalam keadaan terancam

OLEH MARIA Y. BENYAMIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Setahun setelah implementasi liberalisasi tarif dalam kerangka Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), impor produk alas kaki dari China ke pasar dalam negeri melonjak hampir 100%.

Alas kaki China kini bahkan menguasai 61% pasar produk alas kaki impor.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, impor alas kaki dari China pada Januari 2011 mencapai US\$6,69 juta, naik hampir 57% dibandingkan dengan Januari 2010 yang tercatat sebesar US\$7,03 juta.

Secara keseluruhan, alas kaki impor dari berbagai negara yang masuk ke pasar dalam negeri mencapai US\$11,01 juta, naik hampir 57% dibandingkan dengan Januari 2010 yang tercatat sebesar US\$7,03 juta.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Agrisindo) Eddy Widjanarko menilai lonjakan yang sangat signifikan tersebut sebagai lampu merah bagi industri dalam negeri. Jika tidak segera dicegah, lanjut dia, pasar lokal akan terancam karena pangsa pasar yang seharusnya bisa diisi oleh produk lokal justru dikuasai oleh produk impor.

"Peningkatan 100% ini akan semakin berbahaya jika tidak bisa dicegahnya. Ini lampu merah bagi kita. Pasar lokal sungguh dalam keadaan terancam," kata

Pemasok produk alas kaki impor terbesar periode Januari 2011

Negara	Nilai (US\$)
China	6.698.719
Singapura	1.836.882
Hong Kong	817.570
Malaysia	560.522
Vietnam	552.947
Spainol	411.574
Lain-lain	136.718
Total	11.014.932

Sumber: Kementerian Perdagangan

Eddy kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Dia bahkan menduga impor dari China jauh lebih besar dari angka saat ini. Produk alas kaki yang tercatat sebagai impor dari Singapura dan Malaysia, kata dia, kemungkinan besar adalah barang produksi China.

Data menunjukkan impor alas kaki dari Singapura mencapai US\$1,8 juta dan impor dari Malaysia mencapai US\$560.000 selama Januari. "Singapura dan Malaysia tidak memproduksi sepatu. Kemungkinan barang dari negara itu adalah barang produksi China."

Eddy menjelaskan China memiliki lima kekuatan yang mendukung daya saing produk mereka yakni desain yang sangat *up to date*, keunggulan bahan baku, fleksibilitas harga, dukungan perbankan, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang pro industri.

Kondisi itu, lanjut dia, sangat berbeda dengan yang terjadi di Tanah Air. Pasalnya, pengembangan perusahaan alas kaki tidak didukung oleh sejumlah kebijakan yang pro industri dan iklim usaha semakin

tidak kondusif akibat regulasi yang terlalu cepat berubah.

Agresivitas produk alas kaki China dalam menggempur pasar Indonesia sangat sulit untuk dilawan. Satu-satunya cara untuk membanding impor China, menurut Eddy, adalah dengan menggenjot permintaan dalam negeri.

"Dari pihak asosiasi kami mengimbau pemerintah untuk lebih mengutamakan produk alas kaki Indonesia. Gerakan Cinta Produk Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan alas kaki lokal," tuturnya.

Produk low end

Djimanto, Dewan Penasihat Apri-sindo, mengatakan produk alas kaki nasional yang tidak bisa bersaing terjadi pada produk *low end*. Produk alas kaki segmen *high end*, lanjut dia, justru sudah bisa bersaing dan bahkan diterima di pasar ekspor.

"Celakanya pasar di Indonesia justru dipenuhi oleh produk impor segmen *low end* itu. Alas kaki dari China itu kebanyakan untuk kelas menengah ke bawah. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kita memang masih di segmen *low end*. Kalau yang segmen ini diserang, pasar lokal kita pasti terpukul."

Dia menambahkan kapasitas terpasang yang dimiliki oleh industri alas kaki di dalam negeri sebetulnya sangat banyak namun kapasitas terpakai hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya beban biaya operasional, besaran bunga bank yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain dan persoalan logistik dan transportasi yang kurang memadai. (maria.benyamin@bisnis.co.id)

Pemerintah Kuwait beri amnesti pada TKI bermasalah

OLEH R. FITRIANA
Bisnis Indonesia

Keputusan TKI bermasalah dari Kuwait pada 2010

Masalah	TKI (Orang)
PHK sepihak	838
Sakit akibat kerja	334
Penganiayaan	322
Majikan bermasalah	295
Gaji tak dibayar	251
Pelecehan seksual	116
Dokumen tak lengkap	47
Kecelakaan kerja	35
Kerja tak sesuai kontrak	27
Tak mampu bekerja	25
Membawa anak	23
Majikan meninggal	18
Sakit bawaan	17
TKI hamil	8
Komunikasi tak lancar	3
Masalah lainnya	133
Total	2.492

Sumber: Gedung Pemulangan TKI di Selapajang, Tangerang, 2011

JAKARTA: Pemerintah Kuwait akan memberikan amnesti (pengampunan) kepada sedikitnya 1.000 orang tenaga kerja Indonesia bermasalah (TKIB) di negara itu untuk kembali ke Tanah Air pada tahun ini.

Amnesti tersebut merupakan bagian dari peringatan 50 tahun Kemerdekaan Kuwait dan 20 tahun pendudukan Irak di negara itu, serta tahun kelima naik tahta Raja Amir Kuwait, Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.

Pemberian amnesti tidak hanya pada TKI, tetapi juga diberikan oleh pemerintah negeri petro dollar itu kepada tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di negara itu mulai awal Maret hingga 30 Juni 2011.

Data Kedutaan Besar Indonesia di Kuwait menyebutkan saat ini ada 39.027 orang TKI di negara itu dan 90% di antaranya TKI sektor informal atau penata laksana rumah tangga.

KBRI setempat juga menyediakan telepon khusus (*hotline*) bernomor 60671392 dan 60617951 untuk memudahkan kontak dengan TKIB yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan amnesti.

"Dengan amnesti dari Pemerintah Kuwait, TKI bermasalah di penampungan KBRI dapat segera dipulangkan tanpa denda," ujar

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan amnesti itu diberikan bagi TKIB yang tidak tersangkut kasus kriminal, tetapi bagi pekerja yang izin tinggalnya telah habis dan tidak mengurus lagi izinnya atau *overstayers*.

Menurut Jumhur, pembebasan dari kewajiban membayar denda akan meringankan beban TKI ilegal yang bekerja di Kuwait atau TKIB yang kini memenuhi penampungan di KBRI Kuwait.

"Ketentuan pembayaran denda bagi para pekerja asing ilegal di Kuwait akan dikenakan relatif mahal atau diperkirakan mencapai Rp10 juta per pekerja," ungkapnya.

Carrefour Indonesia bidik kelas premium

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT Carrefour Indonesia melanjutkan aksi korporasinya pada tahun ini. Kali ini, perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki oleh Chairul Tanjung, hendak membidik kelas premium.

Menurut rencana, tahap awal—sebagai *pilot project*—gerai premium itu akan diterapkan di Carrefour Lebak Bulus dan Carrefour Permata Hijau. Selanjutnya, konsep yang sama akan diperkenalkan ke berbagai kota besar lain di Indonesia a.l Surabaya. "Saat ini belum ada hipermarket yang bermain di kelas premium. Potensi pasarnya cukup besar. Dengan hipermar-

ket premium itu, kami membidik sekitar 10% dari total pasar hipermarket umumnya," ujar Satria Hamid Ahmadi, Public Affairs Senior Manager Carrefour saat ditemui *Bisnis* pekan lalu.

Langkah awal, perombakan gerai dengan dilakukan dengan tema *one stop shopping leisure and entertainment destination* Carrefour melalui penambahan *area food and beverages (food court)* dengan berbagai fasilitas umum seperti sentra ATM, *service area*, *vip lounge* dan *play-ground*.

Sementara itu, perubahan komposisi produk mulai dilakukan dengan menambah jumlah produk *fresh premium* serta produk premium lainnya. Dia

optimistis dalam waktu 2 tahun, Carrefour dapat menyediakan kuota 50% produk fresh berkualitas dari total produk yang ditawarkan. Selain itu, Carrefour juga fokus menyediakan berbagai macam produk organik sebagai langkah menuju gerai premium.

Saat ini, produk organik Carrefour mencapai 5% dari total produk di gerainya, penambahan produk organik akan seiring dengan penambahan kuota 50% dari produk segar itu.

Untuk mendukung target itu, pihak Carrefour akan mengedukasi dan membina pemasok guna menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Salah satunya melalui pameran hasil bumi segar dan alami bertema Kampung Carre-

four, serta pemberian penghargaan kepada pemasok berkinerja terbaik.

Corporate Affairs Director Carrefour RM Adji Srihandoyo mengatakan selain memberi pembinaan kepada petani lokal melalui kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), juga dilakukan audit secara berkala. "Audit bukan kami yang lakukan, tetapi grup kami dari Prancis sehingga kualitas tetap terjaga."

Dia menambahkan Carrefour juga merekomendasikan pemasok berkualitas untuk mendapatkan bantuan finansial dari Bank Mega berupa pinjaman, tetapi dia enggan memerinci mengenai pinjaman itu.

Selain gerai premium, Carre-

four juga mulai gencar mengembangkan supermarket. Satria optimistis dapat menambah 36 gerai supermarket dalam 5 tahun ke depan, atau menjadi 54 gerai.

Sementara itu, Director of Merchandising and Marketing Matahari Food and Beverages (MFB) PT Matahari Putra Prima Tbk (MPP) Meshvara Kanjaya menyatakan saat ini beberapa produk impor premium mulai mempromosikan produk premiumnya di gerai Hypermart.

Dia menjelaskan butuh waktu yang cukup lama untuk meyakinkan pemasok agar mau berpromosi di Hypermart karena selama ini ada stereotip bahwa hipermarket memiliki segmentasi menengah ke bawah. (13)

Bank Sinar Merintis *Branchless Banking* di Bali

PT BANK SINAR HARAPAN BALI (Bank Sinar) pekan lalu menggelar program edukasi *branchless banking*, yang memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan dengan efisien, kapanpun dan di manapun. Teknologi yang digunakan memungkinkan bank dapat memberikan layanan bukan hanya kepada pelanggan yang sudah ada, tetapi juga pelanggan baru yang selama ini tidak terjangkau layanan perbankan konvensional.

Direktur Utama Bank Sinar Ida Bagus Kade Perdana mengatakan anggota Kelompok Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dan

operator telepon seluler Axis berencana meluncurkan layanan tersebut pertengahan tahun ini setelah mendapat izin Bank Indonesia. IFC memberikan pengalaman mengembangkan layanan serupa di sejumlah negara dan Axis memberikan dukungan teknologi.

Peningkatan layanan ini juga dikaitkan dengan HUT ke-41 Bank Sinar. "Layanan *branchless banking* sangat murah, aman, dan mudah serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan hingga ke pelosok," kata Perdana dalam acara tersebut, Jumat (25/2).

Dengan layanan ini kelak sekitar 112.000 nasabahnya

yang sebagian besar bergerak di usaha mikro, kecil, dan menengah akan mendapatkan layanan yang mudah dan tidak perlu ke kantor kas. Nasabah cukup mendatangi agen yang tersebar di seluruh Bali untuk menabung dan menarik dana, sedangkan untuk transfer antar-rekening cukup melalui ponsel.

Langkah ini melengkapi upaya pengembangan teknologi dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Tahun lalu Bank Sinar meluncurkan transaksi sarat teknologi (*Sirat*) yakni layanan yang memungkinkan *teller* bank dapat menjangkau nasabah di berbagai pelosok dengan membawa *electronic data capture (EDC) portable*. Pada awal Februari 2011 diluncurkan layanan ATM yang dalam waktu dekat *link* dengan ATM Bank Mandiri sebagai induk perusahaan. Bank Sinar diakuisisi Bank Mandiri secara resmi pada 3 Mei 2008.

Program Manager Access to Finance IFC Roger Thomas Moyes mengatakan negara yang berhasil menerapkan *branchless bank* adalah Kenya yang mampu menjangkau 7 juta pengguna ponsel. Layanan serupa juga telah memasyarakat di Filipina dan Afrika Selatan. Moyes yakin Indonesia dengan geografi yang berpulau-pulau memungkinkan untuk pengembangan proyek

rintis ini lebih lanjut.

Apa alasan lain *branchless bank* potensial diterapkan di Indonesia? Dari sekitar 250 juta penduduk diperkirakan hanya 60 juta yang memiliki rekening bank, sedangkan pelanggan telepon seluler bisa mencapai 110 juta. Kesenjangan ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pelanggan telepon seluler. Pada 2013 diperkirakan 70 juta penduduk memiliki rekening bank dan pelanggan telepon seluler meroket hingga 150 juta.

Dengan program *branchless banking* perangkat ponsel bisa 'diberdayakan' dan mengurangi biaya layanan kepada pelanggan sekitar 50-70%. Jaringan seluler mampu memperluas jangkauan layanan perbankan kepada jutaan penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan.

Memang, pada akhirnya tergantung seberapa luas jaringan operator seluler dapat menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Manager Corporate Strategy & Business Development Axis Achmad N Sugondo mengatakan pihaknya telah siap dengan jaringan yang telah menjangkau 70% populasi yang ada di Bali. Secara teknis Axis telah siap memulai layanan ini dan terus berupaya



Suasana simulasi layanan *branchless banking* yang digelar Bank Sinar bersama mitra pendukung International Finance Corporation (IFC) dan operator seluler Axis di Kantor Pusat Bank Sinar, Jl Melati, Denpasar belum lama ini.

menambah jaringan untuk memperluas jangkauan wilayah. Bank Sinar memiliki filosofi *dharma* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan visi menjadi di bank yang dominan di segmen mikro dan UKM di Bali. Bank ini juga mengemban tiga misi yakni mewujudkan dan menjaga Bank Sinar selalu dalam keadaan sehat dan memiliki keunggulan bersaing secara

berkelanjutan; mengembangkan sumber daya manusia (SDM) profesional dan memberi keuntungan yang maksimal bagi *stakeholder* dengan prinsip *pang pada payu* yang berarti saling menguntungkan dan saling memberdayakan.

Bank Sinar memperoleh penghargaan ABFI Banking Award bertajuk *The Best Performance Banking 2009*

sebagai Bank Swasta Kecil Terbaik di Indonesia oleh Asian Banking Finance and Informatic (ABFI) Institut Perbanas pada 24 Juni 2009. Bank ini tercatat sebagai Bank berurutan memperoleh InfoBank Award dengan predikat 'Sangat Bagus' untuk kategori bank dengan modal Rp100 miliar sampai dengan di bawah Rp1 triliun versi majalah *InfoBank*. (13)



Direktur Utama Bank Sinar IB Kade Perdana (tengah) bersama Program Manager Access to Finance IFC Roger Thomas Moyes (kanan) sedang memerhatikan peragaan layanan *branchless banking* yang dilakukan Head of Corporate Strategy & Business Development Axis Ben Sopit dalam sebuah acara edukasi di Denpasar pekan lalu.